

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN
KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

(Studi kasus pada perusahaan yang Listing di BEI periode 2008-2010)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

TRI WAHYUNI
NIM. C2C008143

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008143

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO (Studi kasus pada perusahaan yang listing di BEI 2008-2010)**

Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E, M.Si, Ph.D, Akt

Semarang, 14 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

Puji Harto, S.E, M.Si, Ph.D, Akt
NIP. 197505272000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Tri Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008143
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO (Studi kasus pada perusahaan yang listing di BEI 2008-2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Juni 2012

Tim Penguji

1. Puji Harto, S.E, M.Si, Ph.D, Akt (.....)
2. Drs. Daljono, S.E, M.Si, Akt (.....)
3. Dr. Haryanto, S.E, M.Si, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Tri Wahyuni, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO** (pada perusahaan yang listing di BEI periode 2008-2010)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini, saya nyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil itu dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2012

Yang membuat pernyataan,

Tri Wahyuni
C2C008143

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Zuhudlah engkau pada dunia niscaya Allah mencintaimu dan zuhudlah engkau pada apa yang dicintai manusia pasti manusia mencintaimu (HR. Ibnu Majah: 4102)
- ❖ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar Ra'du, 13:11)

PERSEMBAHAN

- ❖ Kepada seluruh keluarga besar Umi, Abi, Kakak, dan semua saudaraku, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
- ❖ Seluruh sahabatku, terima kasih atas pengalaman dan nilai hidup yang kalian ajarkan selama ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan dan tipe komite manajemen risiko baik yang terpisah maupun tergabung dengan komite audit. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris, frekuensi rapat, tipe kepemilikan, auditor *Big Four*, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *leverage*, umur, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) dengan beberapa perubahan dan eliminasi variabel.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi logistik. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode *random sampling* (acak) yaitu sebanyak delapan puluh perusahaan non bank yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2008-2010. Teori agensi, kebijakan, dan sinyal digunakan untuk menjelaskan hubungan diantara variabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yaitu frekuensi rapat, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan. Sedangkan, variabel independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR terpisah yaitu frekuensi rapat dan ukuran perusahaan.

Kata Kunci: Manajemen risiko, Komite manajemen risiko, *corporate governance*, karakteristik perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of corporate governance and firm characteristics to existence of Risk Management Committee (RMC) and type of RMC, whether it is separated and combined with audit committee. Variables are break down into independent commissioner, meeting frequencies, ownership type, auditor reputation, size of subsidiaries, market risk, leverage, age, and company size. This study replicated prior study conducted by Subramaniam, et al. (2009) with some modification and elimination of variables.

The statistic method to test the hypotheses is logistic regression analysis. Sample are collected using random sampling included in eighty non-bank companies listed in BEI for 2008-2010. This study used agency theory, corporate legitimacy, and signal theory to explain linkage between variables.

This study showed that some independent variables have positive effect to the existence of RMC namely meeting frequencies, size of subsidiaries, and company size. While, independent variables that positively influence the existence of Separate RMC were meeting frequencies and company size.

Keywords : Risk Management, Risk Management Committee, Corporate Governance, Firm Characteristics

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan hal terbaik dengan caranya yang begitu luar biasa. Semoga penulis dapat terus berkarya, berkembang, dan menjadi kebanggaan-Nya.
2. Abi (Salijo), Umi (Sukarsih), mba Oneng, dan mas Dedi yang selalu membuatku bersyukur memiliki kalian . Terima kasih atas segala kepercayaan, keyakinan, perjuangan, dan limpahan kebahagiaan yang kalian berikan. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kalian.
3. Prof. Drs. H. Muhamad Nasir, S.E, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

4. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, S.E, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Bapak Puji Harto, S.E, M.Si, Ph.D, Akt, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, motivasi, dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E, M.Si, Akt, selaku dosen wali atas dukungan dan perhatiannya.
7. Bapak Warsito Kawedar, S.E, M.Si, Akt, Dr. Jaka Isgiyarta, S.E, M.Si, Akt, Nur Shiddiq, S.E, M.Si, Akt, atas kepercayaan dan motivasi-motivasinya yang begitu berharga beserta seluruh dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan dibagian tata usaha, perpustakaan, dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
9. Mbak Safa, Kayla, Hera, Ami, Amanda, Anisa, dan teman-teman di YPII Nurul Jannah, terima kasih atas kasih sayang dan pelajaran hidup sehingga mampu merubah ulat menjadi kupu-kupu.
10. Teman-temanku Firda, Kiki, Sekar, Nabila, Mira, terima kasih atas kebersamaan, kasih sayang, dan dukungannya selama ini.
11. Teman-teman KKN Desa Dudakawu, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang telah diberikan.

12. Semua teman-temanku di Fakultas Ekonomi UNDIP yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terutama teman-teman akuntansi angkatan 2008.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2012

Penulis,

Tri Wahyuni
C2C008143

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi.....	12

2.1.2	Teori Legitimasi Perusahaan.....	14
2.1.3	Teori Sinyal.....	15
2.1.4	Corporate Governance.....	16
2.1.5	Manajemen Risiko.....	22
2.1.6	Komite Manajemen Risiko.....	25
2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		42
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
3.2	Populasi dan Sampel.....	48
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5	Metode Analisis.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.2	Analisis Data.....	57
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	57
4.2.2	Uji Hipotesis.....	60
4.3	Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Keterbatasan.....	81

5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Market Range by Corporate Governance in Asia.....	20
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Keberadaan KMR.....	57
Tabel 4.2 Keberadaan Tipe KMR.....	57
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif.....	58
Tabel 4.4 Uji Hosmer and Lemeshow Model Regresi I.....	60
Tabel 4.5 Uji Hosmer and Lemeshow Model Regresi II.....	61
Tabel 4.6 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir.....	61
Tabel 4.7 Nilai Negelkerke R Square Model Regresi I.....	62
Tabel 4.8 Nilai Negelkerke R Square Model Regresi II.....	63
Tabel 4.9 Matriks Klasifikasi Model I.....	64
Tabel 4.10 Matriks Klasifikasi Model II.....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I.....	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model II.....	66
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1 Strukur <i>corporate governance</i>	17
Gambar. 2 Proses Manajemen Risiko.....	24
Gambar. 3 Desain Kerangka Pemikiran.....	33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bagian penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian secara umum. Bab ini sebagai pengantar untuk memahami secara lebih jauh permasalahan yang akan diteliti.

1.1 Latar Belakang Masalah

Risiko merupakan suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian (Hanafi, 2009). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 /PMK.010/2009 juga dijelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian (PMK No. 191/PMK.04/2010). Apabila risiko tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan kerugian bagi perseroan bahkan kebangkrutan yang dialami sejumlah perusahaan.

Perseroan mulai berinisiatif meningkatkan tata kelola perusahaan dengan penekanan signifikan pada peranan manajemen risiko (Subramaniam, McManus, Zhang, 2009). Mereka mulai menyadari akan pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan dalam dunia bisnis yang semuanya serba tidak pasti dan untuk meningkatkan nilai perseroan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip GCG tercantum dalam undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun

2007 yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Implementasi GCG bukanlah suatu proses yang mudah. Hal ini memerlukan pemahaman, komitmen, dan konsistensi dari seluruh organ perseroan khususnya dewan komisaris dan direksi mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan.

Berdasarkan undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tugas utama Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan yang dijalankan direksi. Pengawasan kepengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dalam memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan perseroan. Dewan komisaris bersama direksi memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Oleh karena itu, untuk meringankan tugas pengawasan dan pengendalian internal, dewan komisaris membentuk sub organ yaitu komite-komite (Subramaniam *et al*, 2009).

Komite merupakan salah satu mekanisme yang efisien untuk fokus perusahaan terhadap risiko, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Komite yang tepat adalah komite audit, komite manajemen risiko atau komite relevan lainnya (ASX, 2007 dalam Subramaniam,*et al*. 2009). Keberadaan komite-komite pada BUMN diatur dalam KepMen BUMN no. 117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG. Komite yang dibentuk untuk mengelola risiko adalah Komite Manajemen Risiko (KMR). Dalam PMK No. 191/PMK.04/2010 disebutkan bahwa komite manajemen risiko adalah komite yang bertugas menetapkan

kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. KMR bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi efektifitas dan integritas proses manajemen risiko. Dengan demikian, komite manajemen risiko memiliki fungsi pengungkapan risiko laporan keuangan dan risiko manajemen, yang meliputi risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko pasar (Hanafi, 2009).

Kompleksitas manajemen risiko membuat kualitas pengendalian internal lebih tinggi ketika adanya komite manajemen risiko dibandingkan situasi tidak adanya komite manajemen risiko (Subramaniam *et al.*, 2009). Namun demikian, menurut KPMG (2005) dalam Subramaniam, *et al.* (2009) ditemukan bahwa komite manajemen risiko masih ada yang diintegrasikan dengan komite audit. Hal ini sesuai dengan lampiran keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang pedoman pelaksanaan kerja komite audit bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah melaporkan kepada dewan komisaris mengenai berbagai risiko dan pelaksanaan manajemen risiko. Sebagai akibatnya, peran yang luas dan tanggung jawab komite audit yang besar meningkatkan kritik dan keraguan terhadap kemampuannya untuk berfungsi secara efektif (Subramaniam, *et al.* 2009). Oleh karena itu, pengendalian internal terhadap manajemen risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika komite manajemen risiko berdiri sendiri dibandingkan ketika diintegrasikan dengan komite audit.

Beberapa faktor *corporate governance* dan karakteristik perusahaan berikut ini diindikasikan berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Faktor dewan independen merupakan mekanisme yang penting untuk

mengendalikan perilaku manajemen dalam hal akuntabilitas dan *disclosure*. Jumlah komisaris independen adalah indikator kunci independensi dewan bagi manajemen. Hadirnya komisaris independen seharusnya meningkatkan kualitas pengendalian karena mereka tidak berafiliasi dengan perusahaan dan merupakan perwakilan independen dari kepentingan *shareholders*. Perusahaan dengan dewan independen akan memiliki *agency cost* (biaya agensi) yang rendah bahkan mampu melakukan fungsi pengendalian dengan lebih baik (Subramaniam *et al*, 2009).

Rapat dewan komisaris secara potensial merupakan peristiwa penting dalam manajemen sebuah perusahaan. Rapat dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perseroan terutama terhadap risiko dan manajemen risiko. Penelitian Zoort, *et al* (2002) dalam Sutaryo, *et al* (2010) menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Hal ini menuntut pelaporan yang lebih intensif terhadap kinerja dewan direksi. Sehingga, pembentukan KMR diharapkan akan lebih tinggi ketika frekuensi rapat dewan komisaris tinggi.

Tipe kepemilikan perusahaan berkaitan dengan tujuan perusahaan dan kemampuan mempengaruhi jalannya perusahaan. Sebagai akibat, fungsi kepemilikan dan kontrol yang dimilikinya. Menurut Raditya (2006) bahwa pemilik usaha maupun investor berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dengan risiko usaha sekecil mungkin (*risk averse*). Untuk mencapai tujuan yang bersifat *profit motive*, maka pemilik perusahaan senantiasa akan

memilih kriteria manajemen yang diharapkan mampu menjalankan usaha tersebut. Tipe kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan pemerintah, swasta, dan asing.

Faktor *corporate governance* lainnya adalah reputasi auditor eksternal. Auditor eksternal dengan kualitas yang lebih tinggi terkait dengan kemungkinan berkurangnya dari masalah pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Doyle, *et al.* 2007 dalam Sutaryo, *et al.* 2010). Auditor *Big four* dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal klien dengan membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem desainnya. Perusahaan Auditor *Big four* cenderung mendorong kualitas mekanisme pengendalian internal yang lebih tinggi diantara klien mereka apabila dibandingkan dengan perusahaan bukan *Big four* (Cohen *et al.*, 2004 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Yatim (2009) bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan komite manajemen risiko.

Faktor karakteristik perusahaan diantaranya adalah jumlah anak perusahaan. Organisasi dengan jumlah anak perusahaan yang banyak berpotensi memiliki risiko internal maupun eksternal lebih besar. Menurut Carcello, *et al* (2005) dalam Subramaniam, *et al* (2009) bahwa besarnya jumlah segmen bisnis meningkatkan kompleksitas organisasi. Hal ini diperkuat dengan Penelitian Yatim (2009) bahwa kompleksitas bisnis berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR. Sehingga, perusahaan diharapkan akan lebih termotivasi dalam menyelenggarakan KMR yang terpisah.

Demikian juga, faktor risiko pasar (risiko sistematis) timbul karena adanya pergerakan pasar dari portofolio yang disebabkan perubahan suku bunga, resesi ekonomi dan nilai tukar yang dampaknya dirasakan oleh semua instrumen investasi (Samsul, 2006). Pergerakan pasar memiliki risiko yang signifikan karena berada diluar kendali perusahaan dan sangat dipengaruhi oleh tarik menarik pasar (Hartono, 2003). Dengan adanya risiko pasar diharapkan mendorong keberadaan KMR. Sehingga, KMR dapat memastikan terukurnya eksposur risiko pasar secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

Faktor lain yaitu risiko laporan keuangan yang ditinjau dari *leverage*. Perusahaan dengan jumlah utang jangka panjang yang besar akan mempengaruhi *leverage* perusahaan sehingga dapat meningkatkan risiko keuangan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Purbawati (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *leverage*, maka dibutuhkan biaya *monitoring* yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena biaya agensi terkait transfer kekayaan dari debtholder kepada manajer cenderung tinggi (Chen, *et al.* 2009 dalam Purbawati, 2011).

Menurut Rahmawati, *et al.* (2009) bahwa faktor umur perusahaan dapat menunjukkan eksistensi perusahaan dalam bersaing. Perusahaan yang lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi perusahaan. Demikian juga, menurut hasil penelitian Ramadhani, *et al* (2009) bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tua umur perusahaan akan mendorong penyelenggaraan KMR terutama KMR terpisah.

Sejak *agency cost* menjadi lebih tinggi pada organisasi yang lebih besar maka membutuhkan *monitoring* yang lebih besar terhadap manajemen risiko (Carcello, *et al.* 2005 dalam Subramaniam, *et al.* 2009). Perusahaan besar menciptakan potensi masalah keagenan yang lebih besar terkait pelaporan keuangan. Demikian juga, dengan hasil penelitian Andarini (2010) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keberadaan KMR maupun KMR terpisah. Oleh karena itu, penyelenggaraan KMR terutama KMR terpisah akan memfasilitasi pengendalian risiko yang lebih baik terutama pada perusahaan besar.

Berdasarkan pentingnya peran dan fungsi komite manajemen risiko maka hal tersebut menjadi motivasi utama dalam penelitian. Penyelenggaraan komite manajemen risiko tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini tetapi kurang diimbangi dengan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan ditambahkan variabel-variabel baru seperti, frekuensi rapat, tipe kepemilikan saham, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, dan umur perusahaan.

Motivasi kedua adalah perhatian yang lebih terhadap struktur penyelenggaraan sub-komite dan hubungan diantara komite. Hasilnya menyatakan bahwa pembentukan sub-komite berhubungan secara sistematis dengan memilih faktor organisasi tata kelola perusahaan seperti komposisi dewan dan kepemimpinan, kepemilikan, dan ukuran organisasi (Subramaniam, *et al* 2009).

Carson (2002) dalam Subramaniam *et al* (2009) juga menemukan bahwa komite remunerasi berhubungan dengan Auditor *Big Four* dan investasi institusi.

Motivasi ketiga adalah bahwa komite manajemen risiko sebenarnya masih banyak yang diintegrasikan dengan komite audit (KPMG, 2005, dalam Subramaniam, *et al* 2009). Akan tetapi menurut Alles, *et al.* (2005) dalam Subramaniam, *et al.* (2009) bahwa peran dan tanggung jawab yang luas membuat sejumlah kritik dan keraguan atas kemampuan mereka untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Berbagai kritik dan kendala terhadap keberadaan komite manajemen risiko memotivasi penelitian ini untuk mengkaji secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan keberadaan dan tipe komite manajemen risiko di perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Subramaniam, *et al.* (2009).

1.2 Rumusan Masalah

Pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan dalam kondisi dunia bisnis yang serba tidak pasti dan untuk meningkatkan nilai perseroan bagi para pemangku kepentingan maka perlu dibentuk komite manajemen risiko (KMR). Keberadaan KMR terutama yang berdiri sendiri diharapkan mampu mengurangi *agency cost* karena sifat *opportunistic* yang dilakukan oleh manajemen atau direksi.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah faktor-faktor *Corporate governance* (independensi

dewan komisaris, frekuensi rapat, tipe kepemilikan, reputasi auditor) dan karakteristik perusahaan (jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *Leverage ratio*, umur dan ukuran perusahaan) berpengaruh positif terhadap keberadaan komite manajemen risiko?”.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh faktor-faktor yang berhubungan dengan keberadaan dan tipe komite manajemen risiko dengan studi kasus pada perusahaan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Secara khusus lagi, untuk menguji apakah faktor-faktor *corporate governance* dan karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan komite manajemen risiko sebagai sub komite dewan komisaris. Faktor *corporate governance* tersebut adalah independensi dewan komisaris, frekuensi rapat, tipe kepemilikan, reputasi auditor. Faktor karakteristik perusahaan seperti, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *leverage ratio*, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan.

Tujuan yang kedua adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap tipe keberadaan komite manajemen risiko yang dipisah dan komite manajemen risiko yang diintegrasikan dengan komite audit.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara ekonomis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah empiris yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan perseroan yang tepat dan relevan.
- b. Secara keilmuan, penelitian ini dapat menambah bukti empiris dalam literatur *corporate governance* yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan keberadaan komite manajemen risiko di Indonesia .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika usulan penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan yang disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang melandasi penelitian yang meliputi : teori agensi, teori legitimasi, teori sinyal, *good corporate governance* (GCG), manajemen risiko, komite manajemen risiko, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian atau pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua akan dijelaskan tinjauan pustaka penelitian. Tinjauan pustaka merupakan studi pemahaman terhadap teori, konsep dan metode yang membentuk kerangka berpikir yang logis.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan konsep yang dijadikan dasar teoritis yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dalam penelitian. Berikut ini akan dijelaskan beberapa landasan teori dan telaah pustaka yang berkaitan dengan keberadaan komite manajemen risiko yaitu:

2.1.1 Teori Agensi

Teori yang dijadikan dasar dalam penelitian adalah Teori Agensi. Hendriksen dan Breda (1992) menjelaskan bahwa pihak (Prinsipal) mengadakan kontrak dengan pihak lain (Agen) untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal atau evaluator informasi. Prinsipal bertanggung jawab memilih sistem informasi untuk membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik (fungsi utilitas). Fungsi utilitas inilah yang menggerakkan aksi-aksi agen.

Menurut Hendriksen dan Breda (1992) menyatakan bahwa prespektif *moral hazard* adalah salah satu bentuk menghindari risiko memungkinkan berperilaku secara berbeda daripada yang seharusnya. *Moral hazard* muncul karena seorang individu atau institusi tidak menahan konsekuensi penuh atas tindakannya. Oleh karena itu, memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang

hati-hati dari pada yang seharusnya dan meninggalkan pihak lain untuk menderita kemungkinan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Prinsipal akan selalu tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh agen mereka. Teori keagenan memberikan landasan utama dalam kaitannya dengan penyediaan informasi tentang aktivitas yang telah terjadi. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga sangat dibutuhkan pihak yang kompeten dalam menyediakan informasi berkaitan dengan risiko dan pengendalian kemungkinan sifat *opportunistic* agen. Adanya pihak yang kompeten untuk menangani pengendalian risiko akan memiliki *agency cost yang rendah*.

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan membentuk Komite manajemen risiko. Komite tersebut membantu dewan komisaris dalam pengawasan perusahaan. Terutama dalam strategi, kebijakan, dan proses manajemen risiko perusahaan. Sehingga, dewan komisaris dapat memperoleh informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pada dasarnya, komite tersebut untuk memberikan kualitas pengendalian internal yang lebih baik, yang terpenting lagi untuk memperkecil perilaku *opportunistic* agen (Subramaniam, *et al* 2009) .

Dengan demikian, penyelenggaraan komite manajemen risiko merupakan mekanisme *good corporate governance* untuk mengatasi masalah keagenan. Mekanisme pengendalian memperkecil perbedaan diantara kedua belah pihak. Menurut Subramaniam, *et al*, 2009 bahwa usaha pencegahan yang dilakukan prinsipal adalah:

- a. mengawasi perilaku agen dengan adopsi audit dan mekanisme perusahaan lainnya untuk meluruskan kepentingan agen dengan prinsipal
- b. memberikan insentif yang menarik untuk agen dan mengadakan struktur hadiah untuk mendorong agen agar bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal

Pembentukan komite merupakan mekanisme *good corporate governance* yang efektif untuk mengatasi masalah agensi. Pada umumnya, komite tersebut diprediksi ada ketika situasi *agency cost* cenderung tinggi, misalnya *leverage* tinggi dan ukuran perusahaan yang besar dan kompleks (Subramaniam, *et al* 2009).

2.1.2 Teori Legitimasi perusahaan

Legitimasi menurut Maurer dalam Subramaniam, *et al* (2009) didefinisikan sebagai proses agar kebijakan organisasi sejajar atau sistem super ordinat yang kebenarannya diakui yaitu mengimpor, mentransformasikan, mengirim energi, material, dan informasi. Teori legitimasi merupakan sudut pandang yang diadopsi untuk mengetahui bentuk organisasi dan strukturnya yang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan menetapkan kebijakan untuk keberadaannya (Meyer dan Rowan, 1977 dalam Subramaniam, *et al* 2009). Baru-baru ini para *stakeholder* memfokuskan terhadap struktur dan strategi yang diadopsi oleh dewan dalam rapat dan adopsi pengendalian sub komite yang dipandang sebagai suatu strategi untuk menetapkan kebijakan perusahaan.

2.1.3 Teori Sinyal

Teori Sinyal digunakan secara luas untuk menempatkan masalah asimetri informasi di pasar (Morris, 1987 dalam Subramaniam, *et al* 2009). Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini merupakan informasi dari manajemen kepada pemilik dan pihak eksternal atas kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Bagi pihak eksternal bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang tepat.

Kualitas keputusan investor, kreditor, pemerintah dan pihak eksternal lainnya dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajemen lebih mengetahui kondisi internal perusahaan dibandingkan pihak eksternal.

Pada dasarnya, menurut teori sinyal, perusahaan dengan kompleksitas atau dinamis yang tinggi atau industri yang tidak pasti lebih suka untuk menggunakan strategi sebagai sinyal atau simbol komitmen mereka terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Teori sinyal menyarankan bahwa hal ini akan menguntungkan perusahaan untuk mengungkapkan *corporate governance* yang bertujuan untuk menciptakan citra yang baik di pasar. Contoh, baru-baru ini tidak ada aturan *mandatory* yang mensyaratkan perusahaan untuk menyelenggarakan komite manajemen risiko kecuali pada industri perbankan. Akan tetapi menurut teori sinyal, perusahaan boleh membentuk komite manajemen risiko sebagai

sinyal komitmennya terhadap *good corporate governance*. Pengungkapan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi devaluasi investor terhadap perusahaan atau memaksimalkan potensi peningkatan nilai perusahaan.

2.1.4 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

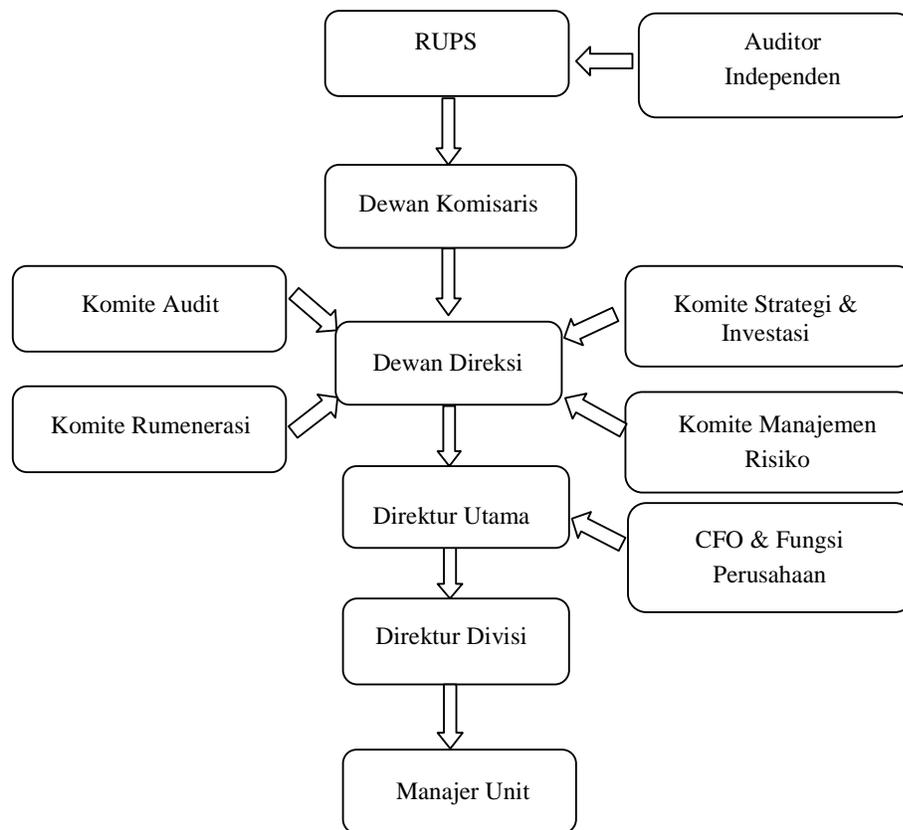
Menurut *World Bank* definisi GCG adalah kumpulan hukum yang wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja secara efisien sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar”.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). FCGI dalam Emirzon (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”.

Berikut ini diagram struktur *corporate governance*:

Struktur Corporate Governance (2011)



Gambar. 1

Sumber : www.structurecorporategovernance.com/2011

Posisi tertinggi sebagaimana ditunjukkan dalam bagan diatas adalah rapat umum pemegang saham (RUPS). Organ lainnya adalah dewan komisaris dan dewan direksi. Berdasarkan surat edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2004 bahwa sepertiga anggota dewan komisaris harus merupakan komisaris independen. Komisaris independen artinya tidak memiliki hubungan dengan organ dalam perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar independensi komisaris dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif. Dewan komisaris bertugas

mengawasi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh dewan direksi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Komite-komite merupakan kepanjangan tangan dewan komisaris untuk mengawasi dan memberikan saran kepada dewan direksi untuk perbaikan.

Secara umum, menurut undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 terdapat lima prinsip dasar *corporate governance* yaitu:

1. **Transparency (keterbukaan informasi)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Accountability (akuntabilitas)**, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibility (pertanggungjawaban)**, yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. **Independency (kemandirian)**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Fairness (kesetaraan dan kewajaran)**, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai perseroan bagi para pemangku kepentingan, seperti kreditor, investor, pemerintah dan lain-lain. Bagi kreditor berguna dalam pengambilan keputusan untuk meminjamkan dananya atau tidak. Bagi investor berguna dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, tidak berinvestasi atau meneruskan kerja sama dengan perseroan. Bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi perseroan bermanfaat dalam pengendalian internal perseroan.

Agar prinsip-prinsip GCG tersebut dapat terwujud maka salah satu mekanisme GCG yang dilakukan terutama dalam manajemen risiko adalah dengan membentuk komite manajemen risiko (KMR). Tugas komite manajemen risiko yaitu mengidentifikasi, evaluasi risiko dan manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan nilai perseroan. Namun demikian, keberadaan komite manajemen risiko di Indonesia terkecuali perbankan masih bersifat sukarela (*voluntary*) belum bersifat wajib (*mandatory*). Padahal fungsi komite manajemen risiko sangat penting terutama dalam manajemen risiko.

Survey dari Allen dalam Kaihatu (2006) di Asia Tenggara pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kajian Price Waterhouse Coopers dalam Emirzon (2006) yang dimuat dalam *Report on Institutional investor Survey* (2002) menempatkan Indonesia di

urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27%, sedangkan di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap risiko tidak dijalkannya GCG, menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh Singapura dengan skor 3,62, Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19.

Berikut ranking pasar *corporate governance* di Asia menurut data CSLA dalam Bashin (2010) sebagai berikut:

Tabel 1. Market Ranked by Corporate Governance in Asia

Market	Rules and regulations (15 %)	Enforcement (25%)	Political and regulations (20%)	IGAAP (20%)	CG Culture (20%)	Country Score (2005)	Country Score (2004)
Singapore	7,9	6,5	8,1	9,5	5,8	7,5	7,7
Hong Kong	6,6	5,8	7,5	9,0	4,6	6,7	7,3
India	6,6	5,8	6,3	7,5	5,0	6,2	6,6
Malaysia	7,1	5,0	5,0	9,0	4,6	6,0	5,5
Korea	6,1	5,0	5,0	8,0	5,0	5,8	5,5
Taiwan	6,3	4,6	6,3	7,0	3,5	5,5	5,8
Thailand	6,1	3,8	5,0	8,5	3,5	5,3	4,6
Philippines	5,8	3,1	5,0	8,5	3,1	5,0	3,7
China	5,3	4,2	5,0	7,5	2,3	4,8	4,3
Indonesia	5,3	2,7	3,8	6,0	2,7	4,0	3,2

Sumber : CSLA Asia Pasific Market, Asian Corporate Governance Association, "CG Watch 2005," p.8. dalam Bashin 2010

Berdasarkan tabel ranking *corporate governance* di Asia, Indonesia berada pada level terbawah dalam kepatuhan peraturan yaitu 5,3; politik 3,8; penerapan

budaya GCG 2,7. Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya *corporate governance*, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi.

Adapun strategi yang diterapkan dalam prinsip-prinsip GCG dengan:

- Pembuatan Manual GCG.
- Pembentukan Komite-komite: Audit, Nominasi dan Remunerasi, Manajemen Risiko serta Komite Kebijakan *Corporate Governance*.
- Menunjuk lembaga Audit Eksternal untuk melakukan audit di perusahaan disamping Internal Auditor.
- Pemberian informasi *Corporate Action* secara terkini kepada publik.
- Melakukan *check & balance* antara pihak-pihak independen dengan pihak terkait serta Pemegang Saham Pengendali dalam rangka peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dimana pada akhirnya hal ini akan meningkatkan nilai bagi *stakeholders*.

2.1.5 Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.04/2010 bahwa Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Menurut Djojosoedarso (1999) manajemen risiko adalah pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko. Manajemen risiko muncul karena adanya risiko. Risiko disebabkan karena adanya ketidakpastian yang mengakibatkan keraguan seseorang terhadap kemampuannya dalam meramalkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di kondisi yang akan datang.

Manajemen risiko menurut COSO merupakan suatu bentuk pengendalian internal. COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) adalah sebuah organisasi sektor swasta yang sukarela didirikan di Amerika Serikat. COSO bertujuan menyediakan panduan kepada manajemen eksekutif dan pengelola perusahaan tentang aspek-aspek kritis dalam pengelolaan organisasi, etika bisnis, pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, kecurangan, dan pelaporan keuangan.

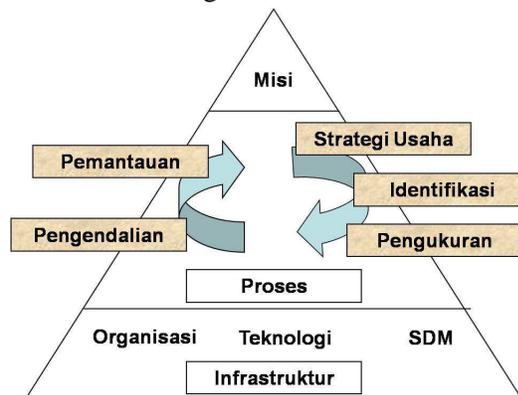
Menurut Djojosoedarso (1999) sebab-sebab terjadinya risiko sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir , makin panjang waktunya makin panjang ketidakpastiannya
- b. Keterbatasan informasi dalam penyusunan rencana
- c. Keterbatasan pengetahuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan

Macam-macam risiko dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Risiko menurut sifatnya:
 - a. Risiko Murni yaitu risiko yang terjadi tanpa disengaja
 - b. Risiko Disengaja (spekulatif) yaitu risiko yang sengaja dilakukan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan
 - c. Risiko Fundamental yaitu risiko yang penyebabnya tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita banyak orang
 - d. Risiko Khusus yaitu yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya.
 - e. Risiko Dinamis yaitu risiko karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ekonomi ilmu dan teknologi
2. Dapat tidaknya dialihkan ke pihak lain
 - a. Risiko dapat dialihkan, contoh : asuransi
 - b. Risiko yang tidak dapat dialihkan, contoh: risiko spekulasi
3. Sumber Penyebabnya
 - a. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perseroan
 - b. Risiko Eksternal yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan eksternal perseroan

Agar perseroan tidak mengalami kerugian maka diperlukan upaya penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan pencegahan, retensi (mentolerir risiko), mengalihkan risiko, dan manajemen risiko (Djojosoedarso, 1999). Manajemen risiko tersebut penting karena adanya evaluasi terhadap program manajemen risiko dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan. Manfaat lain yaitu sebagai kontribusi secara langsung terhadap peningkatan keuntungan perseroan dan kepentingan pihak lain. Adapun proses manajemen risiko sebagai berikut:



Sumber : Djojosoedarso (1999)

Gambar.2

Pada gambar diatas, proses manajemen risiko diawali dengan identifikasi tujuan usaha, strategi usaha dan infrastruktur terkait terhadap kemungkinan risiko material yang muncul dalam aktivitas usaha. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap kemungkinan seberapa besar risiko terjadi. Setelah tingkat risiko diketahui maka dilakukan manajemen risiko. Manajemen risiko berkaitan dengan langkah-langkah yang harus diambil untuk penaggulangan risiko tersebut.

Kemudian tetap dilakukan pemantauan sejauh mana keberhasilan manajemen risiko dalam menanggulangi risiko.

Manajemen risiko tidak bisa terlepas dari peran manusia atau kemampuan organ perseroan. Organ perseroan yang tepat untuk melakukan manajemen risiko adalah organ yang dianggap memiliki skill dan kemampuan yang baik dalam penilaian risiko yaitu komite manajemen risiko.

2.1.6 Komite Manajemen Risiko

Dalam PMK No. 191/PMK.09/2008 disebutkan bahwa komite manajemen risiko adalah komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. Komite juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi efektifitas dan integritas proses manajemen risiko. Dengan demikian, komite manajemen risiko memiliki fungsi pengungkapan risiko laporan keuangan dan risiko manajemen, yang meliputi risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko pasar (Hanafi, 2009). Namun demikian, pembentukan KMR pada perusahaan di Indonesia belum diwajibkan kecuali perbankan.

Menurut Subramaniam *et al* (2009) terdapat dua tipe komite manajemen risiko yaitu komite manajemen risiko yang berdiri sendiri dan komite manajemen risiko yang diintegrasikan dengan komite audit. Komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit akan mampu mengendalikan risiko dibandingkan dengan komite manajemen risiko yang diintegrasikan dengan komite audit. Hal

tersebut disebabkan karena berbagai kritik terhadap tugas komite audit sendiri yang sangat kompleks. Sehingga menimbulkan sejumlah keraguan dan kritik akan kemampuan komite audit dalam manajemen risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 142/PMK.010/2009 tentang manajemen risiko lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 mencakup:

Satuan Kerja Manajemen Risiko :

- (1) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau kepada Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.
- (3) Tugas satuan kerja Manajemen Risiko paling kurang meliputi:
 - a. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko;
 - b. memantau posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas serta melakukan *stress testing*;
 - c. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
 - d. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru;
 - e. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko;
 - f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang keberadaan komite-komite dalam struktur *corporate governance* telah banyak dilakukan seperti keberadaan komite audit, komite nominasi, remunerasi dan lainnya. Namun demikian, penelitian mengenai keberadaan komite manajemen risiko masih sedikit. Hal ini dimungkinkan karena alasan berikut ini yaitu isu tentang komite manajemen risiko baru tumbuh akhir-akhir ini.

Peningkatan penerapan *corporate governance* merupakan bentuk pemulihan dari nilai perusahaan terutama di Indonesia. Menurut survei Allen dalam Kaihatu (2006), Indonesia merupakan negara yang memiliki indeks *corporate governance* terendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Hasil penelitian Subramaniam, *et al* (2009) mendeskripsikan bahwa dari 200 perusahaan, 44 % mempunyai KMR (n=88) dan 56 % tidak mempunyai KMR (n=112). Dari 88 perusahaan yang mempunyai KMR, 25 % nya memiliki KMR terpisah (n=22) dan 75 % masih diintegrasikan dengan komite audit (n=66).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, berikut merupakan hasil masing-masing penelitian yang digunakan sebagai dasar penelitian:

1. “*Corporate Governance, firm Characteristic and Risk Management Committee Formation in Australia’s Companies* (Studi kasus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange*, oleh Subramaniam, McManus, Zhang 2009)”, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan tipe komite manajemen risiko pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ASX. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi direktur non eksekutif, ketua independen, ukuran dewan. Sedangkan faktor karakteristik perusahaannya seperti reputasi auditor, kompleksitas organisasi, dan variabel risiko laporan keuangan (piutang dan persediaan, utang jangka panjang). Responden yang digunakan sebagai sampel adalah 200 perusahaan teratas yang *listing* di ASX. Alat statistik untuk menguji hipotesisnya adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ketua independen dalam dewan dan ukuran dewan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Sedangkan, variabel yang berpengaruh terhadap keberadaan tipe KMR terpisah yaitu ketua independen.
2. Yatim (2010) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pembentukan RMC dan struktur dewan. Sampel berjumlah 690 perusahaan yang *listing* di Bursa Malaysia pada tahun 2003. Variabel independen yang digunakan yaitu proporsi komisaris independen, keahlian dewan, CEO independen dan kerajinan dewan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan CEO

independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri.

3. Andarini (2010) melakukan penelitian terhadap hubungan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap pengungkapan RMC pada perusahaan go public di Indonesia. Pada penelitian ini keberadaan RMC terpisah dari audit dan berdiri sendiri sebagai variabel dependen. Karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan KMR dan KMR terpisah.
4. Pratika (2011) melakukan penelitian pengaruh keberadaan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pada penelitian ini keberadaan RMC terpisah dari audit dan berdiri sendiri sebagai variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, segmen bisnis, proporsi piutang dan persediaan, proporsi utang jangka panjang dan ukuran perusahaan. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah 100 perusahaan non keuangan yang *listing* di BEI. Alat statistik untuk menguji hipotesisnya adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*). Hasil analisis menunjukkan bahwa reputasi auditor berhubungan positif terhadap keberadaan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri. Sedangkan variabel komisaris independen, ukuran dewan, segmen bisnis, proporsi piutang dan persediaan, proporsi utang jangka panjang dan

ukuran perusahaan tidak berhubungan positif terhadap keradaan komite manajemen risiko.

5. Purbawati (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh karakteristik dewan komisaris, karakteristik perusahaan, dan keberadaan komite manajemen risiko terhadap luas pengungkapan sukarela”. Variabel dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komiaris, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, risiko pelaporan keuangan, *Leverage*, keberadaan KMR, dan luas pengungkapan sukarela. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan non keuangan yang *listing* di BEI tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan keberadaan KMR dan keberadaan KMR pada perusahaan nonfinansial berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul & Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	“ <i>Corporate Governance, firm Characteristic and Risk Management Committee Formation in Australia’s Companies</i> ”. (Subramaniam <i>et al</i> , 2009)	-Keberadaan KMR -Keberadaan KMR terpisah	-Direktur non eksekutif -Ketua Independen -Ukuran Dewan -Reputasi auditor -Industri Keuangan -Jumlah segmen Bisnis -Porsi piutang & persediaan -Utang Jangka Panjang -Size	-Ketua independen dan ukuran dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberadaan KMR -Ketua Independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberadaan KMR terpisah

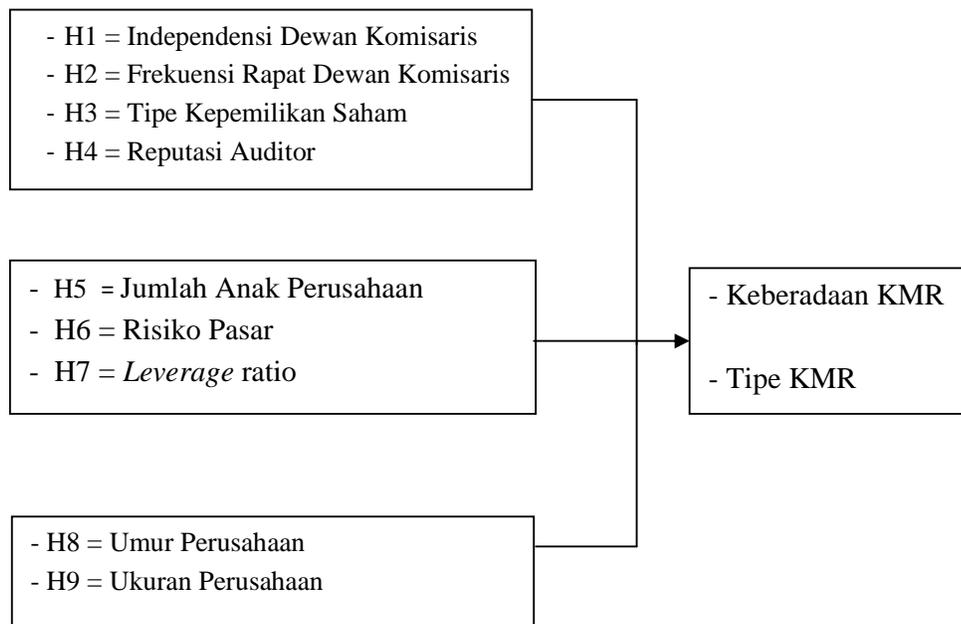
2	“ <i>Corporate Governance and Risk Management : The Role of Risk and Compensation Committee</i> ”. (Yatim, 2010)	Pembentukan KMR dan struktur dewan.	-Proporsi komisaris independen, -CEO independen, -keahlian dewan -kerajinan dewan.	-Proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri.
3	“Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko”. (Andarini, 2010)	-Keberadaan KMR Terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri	-Komisaris independen -Ukuran dewan -Reputasi auditor -Kompleksitas -Risiko pelaporan keuangan -Leverage -Ukuran perusahaan	-Keberadaan KMR berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. -Keberadaan KMR terpisah berhubungan positif dengan ukuran perusahaan.
4	“Pengaruh keberadaan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko”. (Pratika, 2011)	-Keberadaan KMR pada perusahaan di Indonesia	-Komisaris independen -Ukuran dewan -Reputasi auditor -Segmen bisnis -Proporsi piutang dan persediaan -Proporsi utang jangka panjang -Ukuran perusahaan.	-Keberadaan KMR berhubungan positif dengan reputasi auditor
5	Pengaruh karakteristik dewan komisaris, karakteristik perusahaan, dan keberadaan komite manajemen	-Keberadaan komite manajemen risiko -Luas pengungkapan sukarela	- Ukuran dewan komisaris - Komisaris independen - Kompleksitas perusahaan - Risiko pelaporan keuangan - Leverage	- Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan keberadaan KMR - Keberadaan KMR berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela

	risiko terhadap luas pengungkapan sukarela”. (Purbawati, 2011)		- Keberadaan KMR	
--	--	--	------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Komite manajemen risiko (KMR) merupakan sub-komite yang memiliki fungsi sangat penting dalam perseroan. Keberadaan KMR diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai upaya melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perseroan. Fungsi pengawasan melalui KMR terutama terhadap risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal. Namun demikian, keberadaan KMR masih merupakan *voluntary* dan masih banyak yang tergabung dengan komite audit. Padahal tugas komite audit yang kompleks membuat keraguan akan akuntabilitas dan kredibilitasnya dalam memonitor manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR dan tipe KMR.

Faktor-faktor yang diindikasikan mempengaruhi keberadaan dan tipe KMR seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Dalam kerangka penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana desain pemikiran teoritis seperti gambar di bawah ini:



Gambar. 3

Desain kerangka pemikiran

Keterangan:

H1-H4 = Faktor-faktor *corporate governance*

H5-H7 = Faktor-faktor Karakteristik Perusahaan

H8-H9 = Variabel kontrol

Berdasarkan gambar diatas, variabel independennya adalah independensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, tipe kepemilikan, reputasi auditor, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *leverage ratio*. Variabel kontrolnya adalah umur dan ukuran perusahaan. Sedangkan, Variabel dependennya adalah keberadaan KMR dan tipe KMR. Dalam penelitian ini, akan menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap dua variabel dependen.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Martono (2011) hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini terdapat sembilan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Masing-masing hipotesis akan dibagi menjadi dua. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing hipotesis tersebut:

2.4.1 Hubungan independensi dewan komisaris dengan keberadaan KMR

Komisaris independen merupakan mekanisme yang penting dalam pengawasan perilaku manajemen, baik dalam akuntabilitas perseroan maupun *disclosure*. Independen artinya tidak berafiliasi dengan perseroan, komisaris dan pemegang saham utama perseroan, serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan karena mereka tidak berafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai dan merupakan perwakilan independen dari kepentingan *shareholder* (Pincus, *et al* dalam Subramaniam, *et al.*2009). Komisaris independen umumnya juga memiliki reputasi yang lebih tinggi. Komisaris independen memandang bahwa mereka merupakan sebuah mekanisme pengembang reputasi dan pembuat keputusan. Oleh karena itu, komisaris independen cenderung takut jika reputasinya rusak. Sehingga, komisaris independen menuntut kualitas pengawasan yang tinggi dan secara aktif mendorong perusahaan melaksanakan *corporate governance* untuk melindungi reputasinya (Subramaniam, *et al.* 2009). Reputasi tersebut dapat dicapai dengan

komitmen terhadap implementasi *corporate governance* dengan penekanan signifikan terhadap manajemen risiko. Hal ini mendorong dewan komisaris menentukan suatu kebijakan atas penyelenggaraan komite yang tepat untuk membantu fungsi pengawasannya terhadap risiko. Kebijakan tersebut bisa terwujud apabila komisaris independen memiliki suara mayoritas sehingga dapat mempengaruhi keputusan dewan. Jika pengaruh komisaris independen semakin besar maka penyelenggaraan KMR akan semakin kuat terutama terhadap penyelenggaraan KMR terpisah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H1(a) : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H1(b) : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.2 Hubungan frekuensi rapat dengan keberadaan KMR

Menurut penelitian Zoort, *et al* (2002) dalam Sutaryo, *et al.* (2010) menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Frekuensi rapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perseroan lebih intensif, relevan, dan tepat waktu terutama tentang risiko serta kualitas pengendalian internal yang lebih baik. Frekuensi rapat yang semakin tinggi dapat memberikan sinyal-sinyal positif terhadap pengguna laporan keuangan atas kinerja perseroan dalam mencapai tujuan perseroan. Bagi internal perseroan bermanfaat dalam pembuatan keputusan. Sedangkan, kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi

yang diungkapkan. Kualitas informasi berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi tentang kondisi internal terutama manajemen risiko perseroan. Frekuensi rapat dewan komisaris yang semakin tinggi mendorong kualitas informasi yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu, fungsi kehadiran komite manajemen risiko terutama KMR terpisah membantu dewan komisaris dalam pemerolehan kualitas informasi tentang manajemen risiko yang lebih relevan, akurat, dan tepat waktu. Sehingga, peran dewan komite manajemen risiko yang terpisah sangat dibutuhkan dalam pemerolehan informasi tersebut. Berikut hipotesis yang diusulkan berkaitan dengan pernyataan diatas:

H2 (a) : Frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H2 (b) : Frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.3 Hubungan tipe kepemilikan dengan keberadaan KMR

Tipe kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Nofandrilla (2008) dalam Rahmawati dan Utami (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Raditya (2006) bahwa pemilik usaha maupun investor berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dengan risiko usaha sekecil mungkin (*risk averse*). Untuk mencapai tujuan yang bersifat *profit motive*, maka pemilik perusahaan senantiasa akan memilih kriteria manajemen yang diharapkan mampu menjalankan usaha tersebut. Kinerja manajemen akan semakin baik ketika terdapat komite manajemen risiko terutama yang terpisah untuk mengawasi manajemen risiko sehingga mampu

memberikan perbaikan apabila diperlukan. Pemilihan tipe kepemilikan pada penelitian ini didasarkan pada pemegang saham mayoritas. Berdasarkan alasan diatas maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H3(a) : Tipe Kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H3(b) : Tipe Kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.4 Hubungan reputasi auditor dengan keberadaan KMR

Auditor eksternal merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam perseroan. Auditor eksternal dengan kualitas yang lebih tinggi terkait dengan kemungkinan berkurangnya dari masalah pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Doyle, *et al.* 2007 dalam Sutaryo, 2010). Menurut Chohen *et al* (2004) dalam Subramaniam *et al* (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan auditor *Big Four* mendorong mekanisme kualitas pengendalian internal yang lebih tinggi. Secara umum, Auditor *Big Four* dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal klien mereka dengan membuat rekomendasi perbaikan sistem desain tersebut (Subramaniam, *et al.* 2009). Hal ini dimotivasi oleh kebutuhan akan pemeliharaan kualitas audit dan perlindungan akan reputasi mereka. KMR sebagai dukungan tambahan ketika auditor sedang menilai sistem pengendalian risiko internal. Mereka lebih memilih untuk meminimalisasi kerugian reputasi dengan kegagalan audit (Subramaniam, *et al.* 2009). Sehingga, auditor *Big Four* cenderung mendorong penyelenggaraan KMR terutama KMR terpisah dari pada perusahaan non *Big Four*. Oleh karena itu, hipotesis yang diusulkan adalah:

H4(a) : Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H4(b) : Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.5 Hubungan jumlah anak perusahaan dengan keberadaan KMR

Organisasi dengan jumlah anak perusahaan yang banyak biasanya memiliki risiko internal dan eksternal yang lebih rumit. Hal ini dapat menimbulkan potensi risiko yang lebih besar. Keberhasilan pengelolaan bisnis perusahaan induk antara lain ditentukan oleh efektivitas pengelolaan setiap rantai suplai, sehingga anak perusahaan yang beragam bidang usahanya perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi induknya, dan selanjutnya akan menghasilkan suatu sinergi yang menguntungkan. Menurut Carcello *et al* (2005) dalam Subramaniam *et al* (2009) menyatakan bahwa besarnya segmen bisnis akan meningkatkan kompleksitas organisasi. Kompleksitas organisasi yang tinggi akan lebih memotivasi perusahaan dalam menyelenggarakan KMR yang terpisah. Hal ini bertujuan agar risiko dapat dikendalikan secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, berikut hipotesis yang diusulkan:

H5 (a) : Jumlah anak perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H5 (b) : Jumlah anak perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.6 Hubungan risiko pasar dengan keberadaan KMR

Risiko pasar merupakan risiko kerugian akibat pergerakan pasar yang timbul karena adanya pergerakan harga pasar portofolio yang dapat merugikan perseroan (Samsul, 2006). Dampak risiko pasar akan dirasakan oleh semua peserta pasar. Risiko pasar tidak dapat dihindari tetapi dapat diturunkan dengan diversifikasi. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio yang tepat dapat menurunkan tingkat kerugian yang akan ditanggung perseroan. Keputusan diversifikasi yang tepat membutuhkan pihak yang kompeten untuk melakukan fungsi tersebut. Sehingga, semakin tinggi tingkat risiko pasar maka membutuhkan pihak dengan kemampuan analisis yang tepat terhadap diversifikasi potofolio yang baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan KMR khususnya yang terpisah akan memfasilitasi lebih baik terhadap kemampuan pengendalian risiko pasar. Berikut ini usulan hipotesis yang diusulkan terhadap uraian tersebut:

H6 (a) : Risiko pasar berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H6 (b) : Risiko Pasar berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.7 Hubungan *Leverage* dengan keberadaan KMR

Perseroan yang memiliki proporsi utang jangka panjang yang besar maka memiliki risiko keuangan yang lebih besar pula (Goodwin and Kent, 2006 dalam Subramaniam, 2009). Semakin lama jatuh tempo utang semakin besar pula risiko tidak dikembalikan atau perubahan kondisi selama jangka waktu utang. Hal ini akan mendorong pemberi pinjaman meminta pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang lebih baik agar dana yang mereka pinjamkan dapat dikembalikan pada saat jatuh tempo. Salah satu mekanisme pengendalian internal

yang tepat untuk fungsi tersebut adalah dengan menyelenggarakan komite manajemen risiko. Kehadiran komite manajemen risiko yang terpisah dapat meningkatkan kepercayaan kreditor dan pihak eksternal lainnya sebagai bentuk komitmen perseroan terhadap penanganan utang jangka panjang pada saat jatuh tempo. Bagi pihak internal bermanfaat untuk membantu fungsi pengawasan dewan komisaris dalam risiko laporan keuangan. Sehingga, perseroan akan lebih menyelenggarakan KMR terpisah agar fungsi penanganan risiko laporan keuangan efektif. Berikut hipotesis berdasarkan argumen tersebut:

H7 (a) : Jumlah utang jangka panjang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR

H7 (b) : Jumlah utang jangka panjang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yang terpisah.

2.4.8 Hubungan umur Perusahaan dengan keberadaan KMR

Menurut Rahmawati dan Utami (2009) bahwa faktor umur perusahaan dapat menunjukkan eksistensi perusahaan dalam bersaing. Perusahaan yang lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi perusahaan. Menurut hasil penelitian Ramadhani (2009) bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kebangkrutan perusahaan. Dengan demikian, umur perusahaan yang lebih lama juga sangat berisiko terhadap kebangkrutan. Oleh karena itu, keberadaan KMR terutama yang terpisah diharapkan mampu memfasilitasi perusahaan terhadap risiko kebangkrutan bahkan mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha.

2.4.9 Hubungan ukuran Perusahaan (*size*) dengan keberadaan KMR

Menurut Carcello, *et al.* (2005) dalam Subramaniam, *et al.* (2009) bahwa sejak *agency cost* menjadi lebih tinggi pada organisasi yang lebih besar maka membutuhkan *monitoring* yang lebih besar. Perusahaan besar cenderung menerapkan *corporate governance* dengan lebih baik dari pada perusahaan kecil. Perusahaan besar menyadari bahwa komitmen terhadap *corporate governance* mampu meningkatkan nilai perusahaan. Disisi lain, perusahaan besar juga berpotensi terhadap risiko kebangkrutan apabila perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan KMR terutama KMR terpisah akan memfasilitasi pengendalian risiko yang lebih baik. KMR terpisah memiliki kemampuan yang lebih baik terhadap fokus manajemen risiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dengan serangkaian prosedur tertentu yang bersifat baku. Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuji apakah variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel dependen

Terdapat dua variabel dependen yaitu keberadaan KMR dan tipe KMR.

2. Variabel independen

Terdapat tujuh variabel independen yaitu independensi dewan komisaris, frekuensi rapat, tipe kepemilikan, reputasi auditor, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *leverage*.

3. Variabel Kontrol

Terdapat dua variabel kontrol yaitu umur perusahaan dan ukuran perusahaan.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

1) Keberadaan KMR

Dalam penelitian ini, konsep dari keberadaan KMR dalam perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Keberadaan KMR diidentifikasi apakah perusahaan sudah membentuk ataupun mengungkapkan keberadaan KMR.
 - i. KMR yang terpisah - dimana perusahaan mengungkapkan keberadaan KMR yang terpisah dari komite audit atau berdiri sendiri.
 - ii. KMR yang tergabung - dimana perusahaan mengungkapkan keberadaan suatu komite dibawah komite audit.
- b. Tidak ada KMR yaitu perusahaan belum membentuk ataupun mengungkapkan keberadaan KMR.

Variabel *dummy* digunakan dalam pengukuran variabel KMR. Pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki atau mengungkapkan keberadaan KMR dalam laporan tahunannya diberi nilai satu (1) sedangkan tidak memiliki KMR diberi nilai nol (0) (Subramaniam, *et al.* 2009).

2) Keberadaan KMR yang Terpisah dengan Komite Audit (KMR Terpisah)

Dalam komite manajemen risiko sebenarnya masih banyak yang diintegrasikan dengan komite audit (KPMG, 2005, dalam Subramaniam, *et al* 2009). Akan tetapi menurut Alles, *et al.* (2005) dalam Subramaniam, *et al.* (2009)

bahwa peran dan tanggung jawab yang luas membuat sejumlah kritik dan keraguan atas kemampuan mereka untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki atau mengungkapkan keberadaan KMR terpisah dalam laporan tahunannya diberi nilai satu (1) sedangkan sebaliknya diberi nilai nol (0) (Subramaniam, *et al.* 2009).

3.1.2.2 Variabel Independen

1) Independensi Dewan Komisaris

Jumlah komisaris independen merupakan indikator kunci dari independensi dewan komisaris. Perusahaan dengan dewan independen akan memiliki *agency cost* (biaya agensi) yang rendah dan mampu melakukan fungsi pengendalian dengan lebih baik (Subramaniam *et al.*, 2009). Independensi dewan komisaris (KOINDEP) dalam penelitian ini diukur dari jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan.

2) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat secara potensial merupakan peristiwa penting dalam manajemen sebuah perusahaan. Rapat dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perseroan terutama terhadap risiko dan manajemen risiko. Dalam penelitian ini, rapat dewan komisaris (FREKUENSI) dinyatakan dengan berapa kali dalam satu tahun dewan komisaris mengadakan rapat (Sutaryo, *et al.* 2010).

3) Tipe Kepemilikan Saham

Tipe kepemilikan perusahaan berkaitan dengan tujuan perusahaan dan kemampuan mempengaruhi jalannya perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena fungsi kepemilikan dan kontrol yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, tipe kepemilikan saham (TIPEKEPEM) merupakan variabel *dummy* jadi harus dikategorikan terlebih dahulu (Ghozali, 2009). Jika pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah maka diberi kode 0, swasta diberi kode 1, dan asing diberi kode 2.

4) Reputasi Auditor

Reputasi auditor dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal klien dengan membuat rekomendasi pos audit untuk meningkatkan sistem desainnya. Dalam penelitian ini, auditor *big four* merupakan variabel *dummy* jadi harus dikategorikan terlebih dahulu (Ghozali, 2009). Jika auditor eksternal perusahaan tersebut merupakan anggota *Big four* (Deloitte, KMPG, PWC, Ernst and Young) maka diberi kode 1 dan sebaliknya diberi kode 0.

5) Jumlah Anak Perusahaan

Jumlah anak perusahaan yang banyak cenderung memiliki risiko lebih besar baik internal maupun eksternal. Dalam penelitian Yatim (2009) tentang karakteristik komite audit dan manajemen risiko pada perusahaan *listing* di Malaysia bahwa kompleksitas bisnis diukur menggunakan SQRT (*Square Root*). SQRT merupakan nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Dalam penelitian ini, jumlah anak perusahaan dapat menggambarkan kompleksitas bisnis maka jumlah anak perusahaan (ANAKPERUSH) di ukur berdasarkan banyaknya jumlah anak

perusahaan baik kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian di hitung dengan rumus SQRT (*square root*). Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan ukuran jumlah anak perusahaan dengan tidak mengurangi variabilitas makna sebenarnya.

6) Risiko Pasar

Faktor risiko pasar (risiko sistematis) timbul karena adanya pergerakan pasar (volatilitas) dari portofolio. Dalam penelitian ini, risiko pasar (RISKPASAR) diukur dengan beta (β). Beta merupakan suatu pengukur volatilitas *return* suatu sekuritas atau *return* portofolio terhadap return pasar (Hartono, 2003). Dengan demikian, beta (β) merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio. Beta pasar dapat dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return-return sekuritas sebagai variabel dependen dan return-return pasar sebagai variabel independen (Hartono, 2003). Berikut rumus beta (β) :

$$\mathbf{R_i = \alpha_i + \beta_i.R_M + e_i}$$

Keterangan:

R_i = return sekuritas periode ke-i

α_i = koefisien

β_i = beta

R_M = return pasar

e_i = nilai kesalahan residu

7) *Leverage*

Leverage merupakan salah satu risiko pelaporan keuangan. Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan menggunakan hutang jangka panjang untuk membiayai kegiatan operasinya. Dalam penelitian ini, rasio *leverage* dihitung dari proporsi total utang jangka panjang dibagi total aset (Subramaniam, *et al.* 2009).

8) **Umur Perusahaan**

Dalam penelitian ini, umur perusahaan merupakan variabel kontrol. Umur perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol karena berpengaruh positif terhadap kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tua umur perusahaan akan mendorong keberadaan KMR. Menurut Rahmawati dan utami (2009) bahwa faktor umur perusahaan dapat menunjukkan eksistensi perusahaan dalam bersaing. Umur perusahaan dihitung dari awal mula perusahaan didirikan berdasarkan akte pendirian perusahaan sampai pada tahun perusahaan tersebut diteliti (Rahmawati dan utami, 2009).

9) *Size (Ukuran Perusahaan)*

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol karena semakin besar ukuran perusahaan maka pengendalian internal juga semakin besar dan lebih dibutuhkan lagi untuk mekanisme pengendalian perusahaan (Yatim, 2010). Alasan lain yaitu sejak *agency cost* (biaya agensi) diperkirakan menjadi tinggi dalam organisasi yang lebih besar, ini disarankan bahwa meningkatnya *agency cost* membutuhkan monitoring yang lebih besar untuk manajemen risiko (Carcello *et al.*, 2005;

Goodwint dan Kent, 2006 dalam Subramaniam *et al*, 2009). Semakin besar ukuran perusahaan maka potensi risikonya juga semakin besar. Dalam penelitian ini, *Size* (ukuran) didasarkan pada log total aset perusahaan (Subramaniam, *et al*. 2009).

Oleh karena itu, umur perusahaan dan ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian Subramaniam, *et al* (2009) ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus LN (*Logaritma Natural*). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan bilangan dalam jumlah besar dengan tidak mengurangi variabilitas makna sebenarnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti adalah seluruh perusahaan non bank yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Periode penelitian dilakukan tahun 2008-2010 dengan alasan agar diperoleh jumlah sampel dan observasi yang cukup secara statistik.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti sehingga mewakili populasi (Martono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*. *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak terhadap populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak yaitu sebanyak 80 perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2008-2009. Pengambilan sejumlah sampel tersebut dengan alasan cukup dan memenuhi syarat secara statistik serta dianggap mewakili populasi penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari *annual report* (laporan tahunan) yang diterbitkan oleh perusahaan melalui BEI maupun *website* masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sumber data penelitian berasal dari pojok BEI Universitas Diponegoro atau *website* masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel (Martono, 2011). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi dan pustaka yang diperoleh di perpustakaan, *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*, *website* resmi perusahaan, dan pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP. Data kepustakaan yang dikumpulkan berupa konsep-konsep dan teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian didapat dari laporan jurnal, literatur, laporan keuangan, dan sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini.

Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *random sampling*. *Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam strata tersebut (Martono, 2011).

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian.

3.5.2 Uji Hipotesis

Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi logistik (*Logistic Regression*). Analisis regresi logistik merupakan salah satu analisis multivariate untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen (Ghozali, 2005). Pada regresi logistik, variabel dependennya dibagi menjadi variabel *dichotomous* (kategori). Oleh karena itu, penelitian ini sangat cocok dengan model tersebut. Dalam penelitian ini, variabel dependennya dikategorikan menjadi dua yaitu keberadaan komite manajemen risiko (KMR) dan tipe-tipe komite manajemen risiko. Perseroan yang menyelenggarakan komite manajemen risiko diberi kode 1 sedangkan yang tidak diberi kode 0. Untuk variabel dependen kedua yaitu tipe komite manajemen risiko, perseroan yang menyelenggarakan KMR secara terpisah diberi kode 1 sedangkan yang diintegrasikan dengan komite audit diberi kode 0. Sedangkan, variabel independen yang digunakan dalam model ini adalah independensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, tipe kepemilikan saham, reputasi auditor, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *leverage ratio*, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah disajikan sebelumnya maka terdapat dua model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

$$\text{logit } (\rho 1) = \alpha + \beta_1 (\text{KOINDEP}) + \beta_2 (\text{FREKUENSI}) + \beta_3 (\text{TIPEKEPEM}) + \beta_4 (\text{BIGFOUR}) + \beta_5 (\text{ANAKPERUSH}) + \beta_6 (\text{RISKPASAR}) + \beta_7 (\text{LEV}) + \beta_8 (\text{UMUR}) + \beta_9 (\text{UKURAN})$$

$$\text{logit } (\rho 2) = \alpha + \beta_1 (\text{KOINDEP}) + \beta_2 (\text{FREKUENSI}) + \beta_3 (\text{TIPEKEPEM}) + \beta_4 (\text{BIGFOUR}) + \beta_5 (\text{ANAKPERUSH}) + \beta_6 (\text{RISKPASAR}) + \beta_7 (\text{LEV}) + \beta_8 (\text{UMUR}) + \beta_9 (\text{UKURAN})$$

Dua variabel dependen diukur dengan:

1. Keberadaan KMR: variabel *dichotomous* dimana 1 = keberadaan KMR (baik yang terpisah atau tergabung dengan komite audit) dan 0 = tidak ada KMR
2. Keberadaan KMR terpisah: variabel *dichotomous* dimana 1 = keberadaan KMR terpisah dan 0 = tidak ada KMR terpisah (yaitu KMR digabung dengan komite audit)

Sembilan variabel independen:

- KOINDEP : Jumlah komisaris independen
- FREKUENSI : Jumlah rapat dewan komisaris per tahun
- TIPEKEPEM : Variabel dummy dimana 0= pemerintah, 1=swasta, 2= asing

- **AUDBIGFOUR** : Variabel dichotomous dimana 1 = eksternal auditor yang merupakan kelompok perusahaan akuntan “Big Four” dan 0 = lainnya
- **ANAKPERUSH** : Jumlah anak perusahaan baik kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung dihitung dengan rumus SQRT (*Square Root*) untuk mencari nilai akar kuadratnya atau menyederhanakan ukuran.
- **RISKPASAR** : Variabel risiko pasar dihitung dengan menghitung beta (β). Beta pasar dihitung dengan menggunakan teknik regresi yaitu return saham harian ekuitas ke-i sebagai variabel dependen sedangkan return pasar (IHSG) sebagai variabel independen.
- **LEVERAGE** : Proporsi total utang jangka panjang dibagi total aset.
- **UMUR** : Jumlah umur perusahaan dihitung dari awal mula perusahaan didirikan berdasarkan akte pendirian perusahaan sampai pada tahun perusahaan tersebut diteliti. Variabel ini merupakan variabel kontrol dalam penelitian.
- **UKURAN:** Total aset perusahaan dihitung dengan rumus LN (*logaritma Natural*). Variabel ini merupakan variabel kontrol dalam penelitian.

Selanjutnya, hal-hal yang diperlukan dalam analisis pengujian model regresi logistik sebagai berikut:

1. Menilai model regresi

Regresi logistik merupakan model regresi yang mirip dengan analisis diskriminan namun analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2009). Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model dengan kata lain tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit.

Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test statistic* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak sebaliknya jika lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2009).

2. Menilai Overall Model Fit

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditunjukkan dengan *Log likelihood value* (nilai $-LL$), yaitu dengan cara membandingkan antara nilai $-2LL$ pada block number = 0 dan nilai $-2LL$ pada block number = 1.

Jika nilai $-2LL \text{ Block Number} = 0 >$ nilai $-2LL \text{ Block Number} = 1$, maka menunjukkan model regresi yang baik.

3. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel terikat. Koefisien regresi data ditentukan dengan model *Wald statistic* dan nilai probabilitas (sig.) dengan cara nilai *Wald statistic* dibandingkan dengan *Chi-square* tabel sedangkan nilai probabilitas (sig.) dibandingkan dengan tingkat signifikansi α .

- a. H_0 diterima apabila *Wald* hitung $<$ *Chi-square* tabel dan nilai *Asymptotic Significance* $>$ tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila *Wald* hitung $>$ *Chi-square* tabel dan nilai *Asymptotic Significance* $<$ tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen diterima.